

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Peran Mustahiq dalam Tata Tertib

1. Pengertian Peran Mustahiq

Guru menurut bahasa (harfiah) ialah dalam literatur kependidikan Islam seorang guru biasa disebut sebagai *ustadz*, *mustahiq*, *mu'alim*, *murabbiy*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*, yang artinya orang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan dan membina akhlak peserta didik agar menjadi orang yang berkepribadian baik. Mustahiq tidak hanya bertugas untuk mengajarkan apa yang menjadi materi bahan ajar di madrasah diniyah, tetapi lebih dari pada itu mustahiq mempunyai tugas untuk mendoakan, mendidik, mengarahkan dan menanamkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islami terhadap para santri.

Mustahiq merupakan jabatan profesional yang dilakukan oleh orang dewasa, karena itu mustahiq adalah pendidik profesional. Secara implisit, mustahiq yang baik harus menerima dan memikul tanggung jawab sebagai pendidik dan berperan sebagai orang tua, sekaligus sebagai pendidik terhadap santri, dan harus benar-benar mengetahui karakter santri dengan baik.

Jadi, dalam proses belajar mengajar mustahiq harus mengajarkan kepada santri tentang nilai-nilai susila, berani bertanggung jawab terhadap sesama santri, dan tak kalah pentingnya adalah tanggung jawab kepada

Allah Swt. Lebih konkritnya mustahiq dalam pandangan Islam mempunyai tanggung jawab memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh teladan, dan lain-lain. Dalam perspektif Pendidikan Islam tugas guru merupakan amanat yang diterima atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan guru. Amanat tersebut wajib dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Mustahiq merupakan jabatan profesi menerima amanah membimbing, mendidik, mengajar, dan melatih peserta didiknya agar menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab.

2. Pengertian Tata Tertib

Jika suatu bangsa ingin bertahan hidup, maka bangsa itu harus memiliki aturan yang menetapkan apa yang salah dan apa yang benar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang adil dan apa yang tidak adil, apa yang patut dan apa yang tidak patut.¹ Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang mengartikan tata tertib sekolah: sebagai kesediaan mematuhi ketentuan berupa peraturan-peraturan tentang kehidupan sekolah sehari-hari.

Tata tertib sekolah disusun secara operasional guna mengatur tingkah laku dan sikap hidup siswa, guru dan karyawan administrasi. Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar.²

¹ Zubaedi, *Desaian Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan* (Bengkulu: Kencana, 2006), h. 7.

² Muhammad Rifa'i, *Sosiologi Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.140.

Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika Guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan di sekolah. Tata tertib sekolah bertujuan baik untuk menjadikan peserta didik manusia Indonesia yang berkualitas dan taat aturan. Manusia Indonesia yang berkualitas ialah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.³

Tata tertib adalah aturan, kaidah dan susunan tertib adalah peraturan-peraturan yang harus dituruti atau dilaksanakan. Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru, aparat sekolah, dan siswa saling mendukung tata tertib sekolah, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan sekolah.

Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tata tertib sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu

³ Piet A. Sahertian dan Ida Aleida Sahertian, *Supervisi Pendidikan* (Malang: Rineka Cipta, 1992), h. 1.

dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Beberapa pengertian tata tertib sekolah menurut para ahli:⁴

- a. Menurut Dekdikbud, tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten (taat asas) dari peraturan yang ada.
- b. Menurut Mulyono, tata tertib sekolah adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat.
- c. Menurut Wiratomo, tata tertib sekolah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Dari banyak pengertian tata tertib sekolah diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tata tertib sekolah adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang tertulis dan wajib ditaati warga sekolah dan bersifat mengikat agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

B. Madrasah Diniyah Pondok Pesantren, Menjaga Mutu Lulusan

1. Pengertian Madrasah Diniyah

Kata “*Madrasah Diniyah*” berasal dari dua kata Bahasa Arab: *Madrosatun* artinya madrasah atau sekolah. *Diniyah* artinya keagamaan. Adapun yang dimaksud Madrasah Diniyah menurut Direktur Pendidikan

⁴ Muhammad Rifa’i, *Sosiologi Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 140.

Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan. Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agam islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal.

Sistem belajar di madrasah Diniyah merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pesantren salafiyah, karena pada awalnya dalam penyelenggaraan pendidikannya dilakukan dengan cara tradisonal. Adapun ciri khas untuk mempertahankan tradisi pesantren adalah mempertahankan paradigma penguasaan kitab kuning. Sementara pada awalnya, sistem pembelajarannya menggunakan metode *halaqoh*, yaitu model belajar di mana guru duduk di lantai di kelilingi oleh santri (murid), dengan mendengarkan penyampaian ilmu-ilmu agama. Namun model *halaqoh* tersebut mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman Adapun perubahan yang dilakukan dengan dari sistem halaqoh ke sistem klasikal. Perubahan model tersebut berdampak pada respon masyarakat (Islam) dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Bergesernya sistem halaqoh yang berlaku di pesantren ke sistem klasikal di Madrasah memberikan situasi baru dalam pembelajaran. Pendidikan agama di madrasah Diniyah digolongkan pendidikan keagamaan yang

tertutup terhadap pengetahuan umum, sehingga model pendidikan yang seperti ini di sebut dengan sekolah agama atau sekolah diniyah.

Ada beberapa istilah yang ditemukan dan sering digunakan untuk menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia yang disebut lebih terkenal disebut pesantren. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura, umumnya dipergunakan istilah pesantren atau pondok⁵ atau pondok pesantren.⁶ Di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau meunasah, sedang di Minangkabau disebut surau.⁷ Secara terminologi, dapat dikemukakan di sini beberapa pandangan yang mengarah pada definisi pesantren. Abdurrahman Wahid, memaknai pesantren secara teknis: *a place where santri (student) live*.⁸ Sedangkan Abdurrahman Mas'ud mengemukakan bahwa pesantren adalah: *the word pesantren stems from "santri" which means one who seeks Islamic knowledge. Usually the word pesantren refers to a place where the santri devotes most of his or her time in and acquire knowledge*.⁹ Dua definisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya sosok pesantren sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan di dalam makna dan nuansanya secara menyeluruh.

⁵ Zamakksyari Dofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1990, h. 18.

⁶ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, h. 15.

⁷ M. Dawam Rahardjo (Peny.), *Pesantren dan Pembaharuan*, cet III, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 5.

⁸ Abdurrahman Wahid, "Principle of Pesantren Education", dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (eds.), *The Impact of Pesantren*, Jakarta: P3M, 1988

⁹ Abd. Mas'ud, "Why the Pesantren as Center for Islamic Studies Remains Unique and Stronger in Indonesia?", Makalah Seminar Internasional di Prince of Songkla University Pattani, tanggal 25-28 Juni 1998.

Pesantren menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, “asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji...”¹⁰ Akar kata pesantren berasal dari kata “santri”, yaitu istilah yang pada awalnya digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa dan Madura. Kata “santri” mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, yang berarti tempat para santri menuntut ilmu. Dalam pemakaian bahasa modern, santri memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian sempit, santri adalah seorang pelajar sekolah agama, sedangkan pengertian yang lebih luas dan umum, santri mengacu pada seorang anggota bagian penduduk Jawa yang menganut Islam dengan sungguh-sungguh, rajin shalat, pergi ke masjid pada hari Jum’at dan sebagainya.¹¹

Setidaknya ditemukan empat teori tentang asal kata santri, yaitu adaptasi dari Bahasa Sansekerta, Jawa, Tamil, dan India. Abu Hamid menganggap bahwa perkataan pesantren berasal dari Bahasa Sansekerta¹² yang memperoleh wujud dan pengertian tersendiri dalam Bahasa Indonesia. Ia berasal dari kata sant yang berarti orang baik dan disambung dengan kata tra yang berarti menolong. Jadi, santra berarti orang baik yang

¹⁰ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 878

¹¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terjemahan Aswab Mahasin dari *The Religion of Java*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983, h. 268.

¹² Sansekerta berarti bahasa kesusastraan Hindu Kuno, Baca Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 878.

suka menolong. Sedangkan pesantren berarti tempat untuk membina manusia menjadi orang baik.¹³

2. Pengertian Menjaga Mutu Lulusan

Menjaga menurut KBBI adalah menunggui (supaya selamat atau tidak ada gangguan). Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.

Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. Mutu pendidikan yang diinginkan tidak akan terjadi begitu saja, mutu yang diinginkan harus direncanakan. Mutu perlu menjadi sebuah bagian penting dalam strategi sebuah institusi dan untuk meraihnya wajib menggunakan pendekatan yang sistematis dengan menggunakan proses perencanaan yang

¹³ Abu Hamid, “*Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*”, dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, h. 328.

matang. Perencanaan strategi merupakan salah satu bagian dalam upaya peningkatan mutu.

Mutu adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui kebutuhan pelanggan. Defenisi ini disebut juga dengan istilah mutu sesuai persepsi “*quality in perception*”¹⁴. Mutu ini bisa disebut sebagai mutu yang hanya ada dimata orang yang melihatnya. Ini merupakan defenisi yang sangat penting. Sebab, ada resiko yang seringkali kita abaikan dari defenisi ini, yaitu kenyataan bahwa para pelanggan adalah pihak yang membuat keputusan terhadap mutu, dan mereka melakukan penilaian tersebut dengan merujuk pada produk terbaik yang bisa bertahan dalam persaingan.

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output.¹⁵ Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pepaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum dan sebagainya) dilakukan secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mendorong motivasi dan minat belajar dan mampu memperdayakan peserta didik.

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah.¹⁶

¹⁴ Edward Sallis, 2010, *Total Quality Management, (Manajemen Mutu Pendidikan)*, Jogjakarta: Ircisod, h.56

¹⁵ Rohiat, *Manajemen Sekolah*, 2008, Bandung: Pt. Refika Aditama, h.52

¹⁶ Rohiat, *Manajemen Sekolah*, 2008, Bandung: PT. Refika Aditama, h.53

Sedangkan output sekolah adalah lulusan yang berguna bagi kehidupan, yaitu lulusan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya, artinya lulusan ini juga mencakup outcome, yaitu hasil dari investasi pendidikan yang selama ini dijalani siswa untuk menjadi suatu yang berguna dan bermanfaat (*benefit*). Secara kasat mata, outcome pendidikan sekolah dasar dan menengah adalah siswa dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bila ia tidak melanjutkan maka dalam kehidupannya dapat berhasil mencari nafkah dengan bekerja kepada orang lain atau mandiri, hidup layak, dapat bersosialisasi dan bermasyarakat.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa input, proses dan output merupakan segala hal yang harus tersedia yang mengalami perubahan menjadi sesuatu yang lain yang menghasilkan produksi yang lebih baik. Produktivitas dapat dipandang sebagai aspek penting dalam mengkaji masalah pengelolaan sistem pendidikan, karena rendahnya kualitas produk/keluaran pendidikan merupakan salah satu masalah kependidikan.

Menurut Sutermeister dalam bukunya Wahyudi¹⁸, mengartikan produktivitas sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kerja dengan pertimbangan kemanfaatan sumberdaya (bahan, teknologi, informasi dan kinerja manusia). Produktivitas dalam arti teknis mengacu kepada derajat

¹⁷ Komariah, A dan Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, c 2005 h.6

¹⁸ Wahyudi, 2009, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)*, Bandung: Alfabeta, h. 77

kefektifan, efisiensi dalam menggunakan sumberdaya, sedangkan dalam pengertian perilaku, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berkembang.

Secara umum produktivitas merupakan arti perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input), yang berkaitan dengan sikap mental produktif, kreatif, inovatif, dinamis profesional dan berjiwa kejuangan. Tingkat produktivitas yang dicapai merupakan indikator efisiensi dan kemajuan ekonomi untuk ukuran suatu bangsa, industri maupun program-program pendidikan.¹⁹

Dalam artian institusi, pendidikan dapat dikatakan berkualitas, jika institusi pendidikan itu mencapai tingkat produktivitas tertentu. Produktivitas mengandung arti efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berarti sejumlah lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi dengan kualitas tertentu, sedangkan efisiensi berarti keserasian yang diperoleh atau yang timbul dalam proses mencapai efektivitas itu.²⁰

Pendidikan tinggi dapat dikatakan berkualitas jika produk pendidikan dapat langsung diserap oleh pemakai lulusan itu, sebagai sisi lain dari upaya melihat kualitas pendidikan. Jika tidak terjadi diskrepansi antara jenis tenaga yang diproduksi dengan pemakai, maka ia dikatakan berkualitas; suatu sistem yang sebenarnya naïf. Jika jumlah yang lulus

¹⁹ Mulyasa, 2007, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.131

²⁰ Sudarwan, Danim, 2008, *Media Komunikasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 42

sama dengan jumlah yang diserap oleh pasaran kerja, maka ia dikatakan berkualitas.²¹

Namun demikian, kualitas pendidikan tidak hanya dilihat secara ekonomis. Pendidikan itu membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepribadian dan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan seterusnya, yang pada akhirnya dapat membangun diri sendiri.

3. Konsep dan Kriteria Mutu Lulusan

Konsep mutu lulusan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh pendidikan yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.²² Dengan kata lain, mutu pendidikan mencakup input, proses, dan output pendidikan. Sementara input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BK, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dll). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dll. Input

²¹ Danim, S, 2008, *Media Komunikasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

²² Uwes, 2003, *Pengembangan Mutu Dosen*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

harapan- harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.

Pendidikan dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik . Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

Manajemen peningkatan mutu penting diterapkan di sekolah, sebab sekolah merupakan proses pelayanan jasa yang menetapkan siswa, orang tua siswa dan masyarakat sebagai konsumen.²³ Sebagai suatu usaha pelayanan jasa, maka kepuasan konsumen merupakan ukuran keberhasilan peningkatan mutu. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus selalu memberikan kepuasan bagi orang tua siswa jika kemajuan anak-anaknya harus merupakan sasaran utama sekolah, dengan kata lain, upaya peningkatan mutu sekolah bermula dan berakhir pada orang tua siswa.

²³ Syarifuddin, 2002, *Manajemen Mutu Terpadu: Konsep Strategi dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo.

Untuk itu dukungan finansial orang tua siswa sangat penting, tetapi hanya dukungan finansial saja tidak cukup bagi sekolah.

Depdiknas dalam kebijakannya telah menggariskan tiga upaya yang harus dilakukan dalam manajemen peningkatan mutu terpadu yaitu: Melibatkan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administrasi melibatkan proses diagnosa dan tindakan untuk menindak lanjuti diagnosa dan melibatkan partisipasi semua pihak, kepala sekolah, guru staf administrasi, siswa, orang tua siswa dan pakar pendidikan.²⁴

Manajemen peningkatan mutu ini memandang sekolah sebagai suatu proses pelayanan jasa yang menetapkan siswa, orang tua siswa dan masyarakat sebagai konsumen. Sebagai suatu usaha pelayanan jasa, maka kepuasan konsumen merupakan ukuran keberhasilan peningkatan mutu. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus selalu memberikan kepuasan bagi orang tua siswa jika kemajuan anak-anaknya harus merupakan sasaran utama sekolah.

Menentukan kriteria lulusan di sebuah sekolah, perlu adanya standarisasi yang merupakan suatu pengejawantahan dari paham all can be measured bahwa segala sesuatu yang dapat diukur. Karena segala sesuatu dapat diukur, maka akan tercapai efisiensi dan diketahui kualitas lulusan yang dihasilkan. Dalam konteks pendidikan nasional diperlukan standar

²⁴ Depdiknas Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional Tahun pelajaran 2008/2009 Badan Standar Nasional Pendidikan.

yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁵

Menurut Beare memberikan petunjuk bahwa standar mutu lulusan dapat ditetapkan dengan:²⁶

- a. Membandingkan dengan mutu yang telah lalu (*comparation with the past*);
- b. Menggunakan mutu dari organisasi lain (*quality of other system*);
- c. Menetapkan mutu yang diinginkan (*desired quality*);
- d. Menetapkan mutu yang diinginkan (*desired quality*);
- e. Mutu menurut pertimbangan profesional (*professional standards of quality*), mutu untuk bertahan hidup (*survival qualiti*);
- f. Mutu yang direncanakan (*planned quality*);
- g. Mutu optimal (*optimal quality*).

Cara-cara penentuan standar mutu tersebut tentu tidak bersifat eksklusif, tetapi beberapa cara dapat digunakan secara bersamaan, sesuai dengan kemampuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam sistem pendidikan nasional, standar yang digunakan untuk mengukur mutu lulusan dengan menggunakan parameter ujian nasional (UN) dan ujian sekolah (US). Untuk mengukur lulusan tersebut perlu adanya standarisasi yang digunakan. Dalam sistem pendidikan nasional, standar yang digunakan untuk mengukur mutu lulusan dengan menggunakan parameter ujian nasional (UN) Karena itu, seorang kepala sekolah perlu menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu lulusan di sekolah yang dipimpinnya. Peningkatan mutu sekolah yang bermuara pada upaya melahirkan lulusan yang bermutu memerlukan perubahan kultur organisasi, suatu perubahan yang mendasar tentang bagaimana individu-

²⁵ Fatimah, S, 2008 *Membangun Perguruan Tinggi yang Bermutu*, hal 9

²⁶ Fatimah, S, 2008 *Membangun Perguruan Tinggi yang Bermutu*

individu dan kelompok memahami peran dan pekerjaan mereka dalam organisasi dan kultur sekolah. Karena itu, kepala sekolah harus senantiasa memahami sekolah sebagai suatu sistem organisasi.

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab X, pasal 72 ayat 1 peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran apabila:

- a. Memperoleh minimal nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok pelajaran estetika, dan kelompok pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- b. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Lulus ujian nasional

Memperhatikan pernyataan tersebut, siapakah yang lebih berhak menentukan kelulusan, pendidikan, satuan pendidikan atau pemerintah? Dilihat dari segi waktu, jelaslah pendidik yang lebih pantas karena dari segi waktu karena segi ranah penilaian ujian nasional tidak menguji tes praktik dan tes sikap, sedangkan guru menilai siswa dengan tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah praktik.²⁷

Sementara itu menurut Diknas bahwa mutu akademik lulusan merupakan gradasi pencapaian lulusan dalam tes kemampuan akademik, yang dalam hal ini Ujian Nasional (UN). UN adalah salah satu alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

²⁷ Prihatin, E, 2011, *Manajemen Peserta Didik*, Bandung: Alfabeta, hal. 153

Adapun alasan mengapa UN itu perlu dilaksanakan dinyatakan pada pasal 3, yaitu Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/satuan pendidikan, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.²⁸

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2017 dan POS USBN disebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan/program pendidikan setelah memenuhi kriteria:

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran
- c. Lulus US dan USBN
- d. Kriteria lain yang dapat ditentukan sekolah seperti kehadiran, rata-rata nilai rapor dan lainnya.

Dari paparan diatas, salah satu kelulusan peserta didik adalah lulus dari Ujian Nasional (UN), yang merupakan tes akademik. Hasil Ujian Nasional (UN) tetap menjadi syarat yang menentukan kelulusan dari peserta didik. Namun, dari sisi lain, tes praktik dan tes sikap juga diperlukan untuk menentukan lulusan dari peserta didik, sehingga salah satu penentu kelulusan peserta didik adalah guru atau pendidik, karena pendidik/guru yang lebih intensif untuk menilai ranah kognitif, ranah afektif, ranah praktek siswa/peserta didik pada proses pembelajaran sehari-hari.

4. Hasil-hasil yang diharapkan dari Sekolah (*Output of the School*)

²⁸ Depdiknas, Permendiknas No. 78 tahun 2008 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009.

Mutu pendidikan atau mutu lulusan tertuju pada mutu lulusan. Merupakan suatu yang mustahil, pendidikan atau sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, jika tidak melalui proses yang pendidikan yang bermutu pula. Proses pendidikan yang bermutu harus didukung oleh personalia, seperti administrator, guru, konselor dan tata usaha yang bermutu profesional. Hal tersebut didukung pula oleh sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media serta sumber belajar yang memadai, baik mutu maupun jumlahnya, dan biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat serta lingkungan yang mendukung .²⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, disadari bahwa kepala sekolah melalui kinerjanya dan kinerja guru yang optimal, dimana guru sebagai seorang pendidik dan pengajar yang profesional akan sangat menentukan terhadap terciptanya sekolah yang memiliki mutu lulusan yang baik, yaitu mutu siswa yang mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka menjawab tantangan moral, mental dan perkembangan ilmu serta teknologi. Siswa yang bermutu adalah siswa yang memiliki kemampuan mengembangkan potensi dirinya sebagai mutu pembelajaran di sekolah. Hasil-hasil sekolah dalam kerangka pendekatan sistem, merupakan salah satu komponen penting, disamping input proses dan lingkungan eksternal.

²⁹ Riduwan, 2009, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk Mahasiswa S1, S2 & S3), Bandung: Alfabeta , hal 87

Menurut Wahjosumidj, *Outcome* dari suatu proses pendidikan, dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Jangka pendek (*immediate or short term*)
- b. Jangka panjang (*long range*)
- c. Gabungan atau insidental (*joint or incidental*)

Hasil proses pendidikan jangka, meliputi:

- a. Penilaian pengembangan intelektual, yang di dalamnya mencakup keberhasilan akademik, keinginan untuk tahu, dan kreativitas.
- b. Penilaian terhadap sikap pengembangan sosial, yang mencakup hubungan antar pribadi, tanggung jawab sosial dan kewargaan sekolah (*school citizenship*).
- c. Penilaian terhadap pengembangan pribadi, yang mencakup integritas moral, kesehatan jasmani dan emosi.
- d. Penilaian terhadap pengembangan kemampuan, kejujuran dan ketrampilan seperti kepedulian karier, kejujuran dan ketrampilan tertentu.

Hasil proses pendidikan jangka panjang dapat dilihat pada para siswa, yaitu:

- a. Penampilan yang lebih dalam mengabdikan diri pada masyarakat, baik secara individual maupun sebagai anggota maupun sebagai anggota keluarga.
- b. Sebagai pekerja dalam satu kegiatan ekonomi yang produktif.
- c. Sebagai pemimpin dan innovator.
- d. Sebagai kontributor dalam bidang kebudayaan.
- e. Sebagai warga yang berpartisipasi.

Terakhir hasil pendidikan yang merupakan gabungan atau yang bersifat insidental (*incidental*):

- a. Terjadi sebagai hasil yang tidak direncanakan.
- b. Terjadi apakah program itu diminta atau tidak diminta atau tidak diminta.
- c. Merupakan hasil kerja sama (*joint*) proses pendidikan.

Lulusan yang siap pakai ternyata mengundang polemik dan kontroversial. Sementara pihak menyatakan bahwa tidak mungkin

(*nonsense*) lulusan yang siap pakai bisa dihasilkan oleh sekolah atau perguruan tinggi, termasuk Fakultas/Jurusan Tarbiyah. Di antara alasannya adalah karena kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan yang ada di masyarakat senantiasa berkembang dan mengalami dinamika. Disamping itu, lembaga pendidikan bukan untuk mencetak lulusan yang siap pakai, tetapi ingin mendidik menyiapkan lulusan yang memahami dirinya dan perannya dimasa depan. Sementara pihak lain justru menghendaki agar sekolah/perguruan tinggi bisa diprogramkan untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai dalam pengertian lulusannya mampu dan siap menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dilingkungan atau masyarakatnya.³⁰

Kesiapan lulusan harus diartikan bahwa mereka siap dengan berbagai kemampuan, alat atau kelengkapan untuk dimanfaatkan di bidang keahliannya. Lulusan yang siap pakai bilamana dia disiapkan dengan kurikulum atau seperangkat pengalaman belajar yang relatif sempurna yang nanti setelah lulus dia siap bekerja sesuai dengan bidangnya.

Kendatipun demikian, pendidikan tidak bisa lepas dari efek-efek luar yang saling mempengaruhi keberadaanya, terutama bagi masyarakat sekitarnya, yang mempunyai hubungan saling ketergantungan. Dalam hal ini pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung kualitas output pendidikan (sekolah) itu sendiri. Semakin besar output

³⁰ Riduwan, 2009, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Untuk Mahasiswa S1, S2 & S3), Bandung: Alfabeta, hal 129

sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap, dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan outputnya, tetapi dengan SDM yang rendah secara kualitas, itu juga menjadi masalah, tidak saja bagi output yang bersangkutan, tetapi berpengaruh juga bagi masyarakat.

Kinerja sekolah (output) dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas/kehidupan kerja dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan kualitas mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, nilai dari portofolio, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, UAN/UAS, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain peserta didik, dan (2) prestasi non akademik seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, ketrampilan kejuaraan dan sebagainya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.³¹

Untuk mengukur output pendidikan dengan cara yang rasional penting sekali hal tersebut dipertimbangkan, seperti yang digunakan para

³¹ Rohiat, *Manajemen Sekolah*, 2008, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 53

akuntan pendapatan negara yang berhubungan secara langsung yang berhubungan dengan peserta didik sebagai fakta dasar yang sangat relevan. Kemudian jumlah peserta didik tersebut dibobotkan berdasarkan pertimbangan tingkatan usianya.³²

5. Standar Kelulusan

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Bab V tentang Standar Kompetensi Lulusan pasal 25 disebutkan:

- a. Standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta dari satuan pendidikan.
- b. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- c. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- d. Kompetensi kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa kompetensi kelulusan harus mencakup sikap (*afektif*), pengetahuan (*kognitif*), dan keterampilan (*psikomotorik*). Standar kompetensi ini harus menjadi acuan pada pemerintah dalam menetapkan standar kelulusan.

Namun, terjadinya kotradiktif antara ketetapan dengan pelaksanaan di lapangan.

Kontradiktif ini terlihat dari kebijakan pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa kelulusan didasarkan dari hasil UAN (Ujian Akhir Nasional). Mata pelajaran yang

³² Mulyasa. E, 2005, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 93

menjadi standar kelulusan dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Tentu saja ini mencakup kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan. Karena UAN (Ujian Akhir Nasional) sendiri hanya bentuk evaluasi pelajaran dan merupakan cakupan dari pengetahuan peserta didik saja, tidak mencakup keterampilan dan sikap mereka saja.

Agar lulusan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai harapan, maka dibuat pendidikan terpadu. System pendidikan harus mencapai seluruh unsur pembentuk system yang unggul. Ada tiga faktor, pertama, sinergi antar sekolah, masyarakat dan keluarga. Kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi. Ketiga, berorientasi pada pembentukan tafaqah islam, berkepribadian islam, dan penguasaan ilmu pengetahuan.³³

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah dalam menentukan kelulusan peserta didik bertentangan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pada undang-undang Sisdiknas (Sistem pendidikan Nasional) menyebutkan bahwa standar kelulusan mencakup kompetensi seluruh mata pelajaran dan mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kenyataan yang terjadi dilapangan, UN menjadi syarat mutlak penentu kelulusan peserta didik. Padahal dalam UN hanya mata pelajaran tertentu saja yang diujikan dan hanya mencakup kemampuan dalam bidang akademik.

³³ Prihatin, E, 2011, *Manajemen Peserta Didik*, Bandung: Alfabeta hal 154

Untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang dicita-citakan, maka diperlukan kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan orang tua. Dukungan dari pemerintah merupakan kebijakan akan kurikulum yang tepat juga amat diperlukan, serta pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan.

6. Manajemen Peningkatan Mutu Lulusan

Manajemen peningkatan mutu lulusan merupakan sebuah proses yang melibatkan semua bagian dalam lembaga pendidikan. Semua bagian tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, bagian tersebut diantaranya adalah siswa, tenaga pendidik/guru, kepala sekolah, serta stakeholder atau masyarakat sebagai pengguna lulusan. Keseluruhan bagian tersebut harus sinergi untuk menghasilkan kinerja sekolah berupa prestasi siswa yang memuaskan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian manajemen peningkatan mutu lulusan meliputi input, proses dan output pendidikan karena meskipun sentral layanan pendidikan adalah output secara umum dan lulusan secara khusus, mutu lulusan itu sendiri sangat terkait dengan mutu input, proses, dan output ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu

bagi berlangsungnya proses, diantaranya meliputi 1) siswa, berupa kesiapan dan motivasi belajarnya, 2) guru, berupa kemampuan profesional, moral kerjanya (kemampuan personal), dan kerjanya (kemampuan social), 3) kurikulum, berupa relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajarannya, 4) sarana dan prasarana, berupa kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajarannya, 5) masyarakat (orang tua, pengguna lulusan dan peruruan tinggi), berupa partisipasinya dalam mengembangkan program-program pendidikan sekolah, mutu komponen-komponen tersebut diatas menjadi focus perhatian sekolah.

Secara lebih rinci dapat disutkan input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BK, karyawan, siswa) dan sumber daya sebelumnya (peralatan, perlengkapan, uang bahan, dan sebagainya). Input perangkat lunak meliputi instruktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan sebagainya. Input harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses berjalan dengan baik karena itu, tinggi rendahnya mutu input data diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula input tersebut.

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam

pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses pengelolaan belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tinggi dibanding dengan proses-proses lainnya.



